

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001

Arif Wijaya | Univeritas Islam Negeri Sunan
Rifjaya2@gmail.com | Ampel Jl. A. Ayni 117 Surabaya

Abstract: This article focuses on the eradication of corruption according to Law No. 31 of 1999 Jo Law No.20 of 2001. Corruption, according to Law No. 28 of 1999 on the implementation of state which is clean and free from corruption, is an unlawful act and the perpetrator may be charged criminal sanction. Law No. 31 of 1991 on corruption eradication, as amended by Law No. 20 of 2001 on the eradication of corruption, contains the notion of corruption that is virtually identical with the understanding of corruption itself. There are some efforts that can be taken in combating corruption in Indonesia, among others, as follows: prevention, enforcement, public education to people and student, and education for NGO (Non Governmental Organization).

Keywords: Eradication of corruption, Indonesia, Law No. 31 of 1999 Jo Law No.20 of 2001.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 JO UU NO.20 Tahun 2001. Korupsi menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah suatu perbuatan melawan hukum dan pelakunya dapat dikenal sanksi pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut: Upaya pencegahan (preventif), Upaya penindakan (kuratif), Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, dan Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Kata Kunci: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.

Pendahuluan

Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bukan masalah baru dalam sejarah kehidupan manusia. KKN di Indonesia telah ada sejak terbentuknya kekuasaan di nusantara. Pemegang kekuasaan sebagai pengelola berbagai sumber daya, cenderung bersikap monopolis dan konservatif, enggan bahkan tidak mau berbagi dengan pihak lain kecuali dengan keluarga atau kroni-kroninya.

Korupsi menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN¹ adalah suatu perbuatan melawan hukum dan pelakunya dapat dikenal sanksi pidana. Korupsi oleh masyarakat dipersepsi sebagai tindak penyelewengan atau penggelapan atau penggelapan atau kekayaan negara/perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang tidak berhak. Korupsi juga bisa diartikan setiap bentuk kecurangan atau pengubahan yang tidak dapat dibenarkan secara administratif, hukum dan moral.

Kolusi menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara. Kolusi dengan demikian adalah wujud persekongkolan atau kerjasama rahasia untuk maksud-maksud yang tidak terpuji, tercela dan jahat.

Nepotisme menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 ialah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Secara psikologis-sosiologis pengertian nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan, mendahulukan, menguntungkan atau memprioritaskan sanak saudaranya, dengan sengaja mengorbankan atau merugikan orang lain atau masyarakat, terutama dalam pemberian jabatan, pangkat atau kesempatan di lingkungan pemerintahan (kekuasaan atau birokrasi) melalui cara-cara yang tidak jujur dan menyalahi aturan hukum serta kelayakan dan kepastasan.

Dengan demikian KKN dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain yang tidak berhak, yang dilakukan melalui suatu persekongkolan

¹ UU No. 28 Tahun 1999, Pasal 1.

dan penempatan sanak saudara, kerabat atau kroni dalam jabatan-jabatan strategis yang sejak dini sudah dapat diperkirakan akan menimbulkan kerugian bagi negara/perusahaan dan masyarakat luas.

KKN dengan pengertian seperti tersebut di atas, sebenarnya KKN itu telah terjadi pada pemerintahan kerajaan masa lalu, pada organisasi dagang VOC yang menyebabkan kehancuran, pada pemerintahan Hindia Belanda, dan pada pemerintahan republik Indonesia sejak awal sampai sekarang. Kasus korupsi besar-besaran yang terungkap pada tahun limapuluhan dilakukan seorang tokoh partai yang sedang menjabat sebagai menteri dalam negeri yang kemudian kabur ke luar negeri. Kasus Markam dan Yusuf muda adalah contoh konkret korupsi kelas kakap pada masa orde lama. Korupsi bahkan kolusi dan nepotisme juga telah terjadi pada masa orde baru dan pemerintahan transisi. Pada masa pemerintahan era reformasi yang sekarang, KKN ditengarai masih tetap menggejala secara kuat, belum ada tanda-tanda kapan berakhir. KKN yang mendera negara dan bangsa Indonesia sudah demikian lama dan akut. KKN menjadi biang terjadinya masalah berat negara dan bangsa dan berlarut-larutnya krisis ekonomi dan moneter yang terasa sulit ditanggulangi.²

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan UU No. 7 Tahun 2006.³

KKN dalam sejarah dan kenyataannya sekarang senantiasa terkait dengan kekuasaan dan terutama melekat pada birokrasi pemerintahan. Pada dasarnya setiap jabatan apapun yang padanya melekat wewenang dan kekuasaan, terbuka peluang untuk melakukan KKN. Karena itu

² Tim Perumus Lokakarya Pemberantasan KKN Forum Komunikasi dan Konsultasi Pakar-Setjen Wantannas Daerah Surabaya, *Kerangka Konseptual Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (Surabaya, Makalah, 2000), 4.

³ UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

TAP MPR No.IX/MPR/1988 dan UU No.28 Tahun 1999 KKN bertujuan agar penyelenggara negara bersih dan bebas dari KKN.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindakan korupsi, terus berupaya secara konkrit, dimulai dari pembenahan aspek hukum, yang sampai saat ini telah memiliki banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan - peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, kemudian tidak kurang dari 10 UU anti korupsi, diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Kemudian yang paling monumental dan strategis, Indonesia memiliki UU No. 30 Tahun 2002, yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditambah lagi dengan dua Perpu, lima Inpres dan tiga Kepres. Di kalangan masyarakat telah berdiri berbagai LSM anti korupsi seperti ICW, Masyarakat Profesional Madani (MPM), dan badan-badan lainnya, sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi telah menjadi gerakan nasional. Seharusnya dengan sederet peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap, dan pikiran kita dari tindakan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 JO UU NO.20 Tahun 2001

Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak-beresan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujur⁴.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya⁵.

⁴ S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris* (Bandung: Hasta, 1987), 26.

⁵ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 35.

- c. 1. korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
2. korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
3. koruptor (orang yang korupsi).

Pengertian korupsi lebih ditekankan pada pembuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas dan kepentingan pribadi atau golongan. Pengertian “korupsi” lebih ditekankan pada pembuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi atau golongan.

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.⁶ Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum*, yang dimaksud *corruptive* adalah korupsi; perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut⁷:

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 8.

⁷ Ibid., 10.

keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.

- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transaksional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah⁸:

- 1. Keterikatan positif pada pemerintah dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi;
- 2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi;
- 3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan;
- 4. Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi;
- 5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001) memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri, yaitu sebagai berikut⁹.

- 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

⁸ Ibid., 12.

⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 138

- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001)¹⁰.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
 3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).
 4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).
 5. Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001:
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan tentang Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 210.

- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasioanal Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
6. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001).
 7. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001).
 8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: (pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001)
 - a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001).
10. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001:
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang peradilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 - e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya

memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang;
 - g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
11. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001)
12. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan (pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
13. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan

undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi tidak berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan di bagian depan bahwa Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni: “*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*”, bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”.

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu *elitis*, *endemic*, dan *sistemik*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *sistemik*, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik¹¹.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*)¹².

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra-ordinary crimes*, menurut Romli Atmasasmita dikarenakan:

Pertama, masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu program Kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan KKN. Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah merupakan suatu binatang guriya yang mencengkeram seluruh tatanan sosial dan pemerintah.

¹¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 28-31.

¹² Ibid.

Centre for International Crime Prevention (CICP) salah satu organ Perserikatan Bangsa- Bangsa yang berkedudukan di Wina telah secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “*misuse of (public) power for private gain*”. Berbagai wajah korupsi oleh CICP sudah diuraikan termasuk tindak pidana suap (*bribery*); penggelapan (*embezzlement*); penipuan (*fraud*); pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*); penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*); pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*); nepotisme (*nepotism*); komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (*illegal commission*); dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik.

Kedua, korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Ketiga, kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan sedemikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia.

Keempat, penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya tidak diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.

Kelima, korupsi di Indonesia bukan lagi *Commission of Anti Corruption (ICAC)* di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian tersebut pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik. Kita menyaksikan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Perkembangan kelima cocok dengan perkembangan di tanah air, karena kebijakan pemerintah dalam pembentukan BUMN / BUMD atau penyertaan modal pemerintah kepada sektor swasta, sehingga

pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih sulit dari Hongkong, Australia dan negara-negara lain.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi¹³.

Menurut penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehmanua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia¹⁴:

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru¹⁵
2. Kompensasi PNS yang rendah¹⁶

¹³ Jur. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1-6.

¹⁴ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.), 45-92.

¹⁵ Sebagai negara yang baru merdeka atau negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi, selama puluhan tahun, mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai pada Orde Reformasi ini, pembangunan di fokuskan pada ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki SDM, uang manajemen dan teknologi. Konsekuensinya semua didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi.

¹⁶ Wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomisehingga secara fisik dan cultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun *mark up* kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/keluarga. Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti di atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara *instan*. Lahirlah sikap serakah di mana pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatannya, melakukan *mark up* proyek-proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai salah seorang *share holder* dari perusahaan tersebut.

3. *Law enforcement* tidak berjalan¹⁷
4. Hukuman yang ringan terhadap koruptor¹⁸
5. Pengawasan yang tidak efektif¹⁹
6. Tidak ada keteladanan pemimpin²⁰
7. Budaya masyarakat yang kondusif KKN²¹

Upaya Pemberantasan Korupsi

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut: Upaya pencegahan (preventif), Upaya penindakan (kuratif), Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, dan Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

1. Upaya Pencegahan (Preventif)

¹⁷ Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga pemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Lahirlah kebiasaan plesetan kata-kata seperti KUHP (Kasih Uang Habis Perkara), Tin (Ten Persen), Ketuhanan Yang Maha Esa (Keuangan Yang Maha Kuasa), dan sebagainya.

¹⁸ Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.

¹⁹ Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumen yang disebut internal kontrol yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal kontrol di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber-KKN. Konon, untuk mengatasinya Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya, sistem besar yang disebutkan di butir 1 di atas tidak mengalami perubahan-perubahan, sehingga Irjen dan Bawasda-pun turut bergotong-royong dalam menyuburkan KKN.

²⁰ Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu relatif singkat, Thailand telah mengalami *recovery* ekonominya. Di Indonesia tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian negara yang belum *recovery* bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

²¹ Dalam negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari -- mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja, dll -- karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah.

- a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
 - b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
 - c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
 - d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
 - e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
 - f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
 - g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
 - h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.
2. Upaya Penindakan (Kuratif)
- Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :
- a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).
 - b. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
 - c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004).
 - d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp 10 milyar lebih (2004).
 - e. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas *preshipment* dan *placement* deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI (2004).

- f. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).
 - g. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
 - h. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.
 - i. Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004).
 - j. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).
3. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa
- a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
 - b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
 - c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
 - d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
 - e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.
4. Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang meng-hendaki pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi.²²

Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain.

KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi,

²² Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 2006), 25.

merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martir” bagi para pelaku tindak KKN.

Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut :

- a. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
- b. Mendorong pemerintah melakukan reformasi *public sector* dengan mewujudkan *good governance*.
- c. Membangun kepercayaan masyarakat.
- d. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
- e. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberantasannya, dapatlah dikemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangkalnya, yakni:

1. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku.
2. Menciptakan kondisi birokrasi yang ramping struktur dan kaya fungsi. Penambahan/rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol, sehingga komponen-komponen tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara programatis dan sistematis.
4. Mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup.
5. Adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas, sehingga tidak menyebabkan kekaburan atau perbedaan persepsi diantara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.
6. Semua elemen (aparatur negara, masyarakat, akademisi, wartawan) harus memiliki idealisme, keberanian untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan secara objektif, jujur, kritis terhadap tatanan yang ada disertai dengan keyakinan penuh terhadap prinsip-prinsip keadilan.
7. Melakukan pembinaan mental dan moral manusia melalui khotbah-khotbah, ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan

hukum. Karena bagaimanapun juga baiknya suatu sistem, jika memang individu-individu di dalamnya tidak dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran dan harkat kemanusiaan, niscaya sistem tersebut akan dapat disalahgunakan, diselewengkan atau dikorup.²³

Selain upaya pemberantasan korupsi diatas, ada upaya lainnya, yakni:

1. Merubah perilaku dan sifat-sifat yang buruk dari diri kita sendiri agar kita jauh dari sifat jidak jujur, tidak amanah sehingga kita akna jauh dari sifat korupsi.
2. Menanamkan sikap untuk menghindari korupsi sejak dini dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil.
3. Selalu berpedoman pada motivasi yang sesungguhnya yaitu akhirat dan Tuhan Yang Maha Esa sehingga semangat akan terus terpacu untuk berbuat kebaikan karena motifasi yang bersumber pada pada Tuhan YME tidak akan pernah kering karena kita telah berpedoman pada sumber dari segala sumber motivasi.
4. Yang paling utama adalah senantiasa membentengi hati kita dengan iman dan takwa yang kuat sehingga perbuatan kita selalu berorientasi pada akhirat yang berujung pada perbuata yang terpuji jauh dan dari korupsi.

Analisis Hukum terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi

Untuk menggambarkan persoalan hukum yang dihadapi Indonesia dalam pemberantasan Tipikor, Muladi membuat sebuah analisis SWOT (*Strenght, weakness, Opportunity, & Threaten*). Analisis SWOT yang dinamis dan bersifat komprehensif sangat bermanfaat untuk merumuskan taktik dan strategi Pemberantasan Korupsi.

1. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatannya ditandai oleh penyempurnaan sejarah struktural dan substantif pada institusi pemberantasan Tipikor dan pembaruan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan Tipikor. Kekuatan lain adalah adanya kemauan politik (*Strong Political Will*) pemerintahan baru yang didukung kehendak masyarakat untuk memberantas KKN yang luar biasa.

2. Kelemahan (*Weakness*)

²³ Ibid., 75.

Kelemahannya menunjuk pada semangat profesionalisme (*expertise, social responsibility, and corporateness*) SDM yang lemah, belum mantabnya reformasi birokrasi yang menjamin keberadaan nilai-nilai efektivitas, kebersihan dan demokrasi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum (arogansi sektoral), serta kepemimpinan sektoral yang sering mendemonstrasikan kemiskinan moral dan intelektual.

Kondisi tersebut pada gilirannya menyebabkan lemahnya disiplin aparat, lemahnya kerja sama internasional (ekstradisi, *MLA (Mutual Legal Assistance), Transfer of proceeding, joint investigation*, pelatihan), kurangnya sosialisasi hukum tentang Tipikor, lemahnya kesadaran terhadap asas-asas tentang *good governance* dan *general principles of good administration* di lingkungan sektor publik serta asas-asas tentang *good corporate governance* di lingkungan sektor privat. Di samping lemahnya budaya anti korupsi (contoh *money politics* yang merebak) dan budaya malu, dan kurangnya kesadaran untuk mengembangkan *preventive anti corruption strategy* dan hanya mengfokuskan diri pada langkah-langkah represif.

3. Peluang (*Opportunity*)

Sementara itu, peluang (*opportunity*) Pemberantasan Tipikor cukup besar berkat kepemimpinan nasional yang memiliki legitimasi sosial yang cukup kuat karena di pilih langsung rakyat yang komit pada Pemberantasan Tipikor. Selain itu, keberadaan *UN Convention Against Corruption 2003* menjanjikan kerja sama internasional yang lebih baik dan menguntungkan negara-negara berkembang, kesediaan pakar-pakar hukum pidana perguruan tinggi dan NGO's yang belum dimanfaatkan secara optimal.

4. Kendala (*Threat*)

Kendala Pemberantasan Tipikor, antara lain masih adanya kekuatan-kekuatan yang tidak reformis dan cenderung bermental KKN, merosotnya citra aparat penegak hukum karena belum menunjukkan kinerja Pemberantasan Tipikor yang memuaskan, kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence judiciary*) yang seolah-olah *untouchable* namun kurang didukung integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas memadai, 'fragmentasi' dan

citra negatif terhadap sistem rekrutmen, promosi dan mutasi di lingkungan penegak hukum. Di sisi lain kesejahteraan pegawai yang rendah (*underpaid*), melibatkan partai politik dalam pemerintahan tanpa konsep yang jelas antara tugas-tugas *political apponitee* dan pejabat karir, lemahnya pembenahan di lingkungan *private sector*, masih adanya ketentuan perundang-undangan yang menghambat Pemberantasan Tipikor, kepemimpinan penegak hukum di segala lini yang lemah, dan praktik-praktik *selective law enforcement* yang masih terjadi.²⁴

Termasuk kendala Pemberantasan Tipikor adalah sebagai berikut:

- a. Motif individu untuk masuk sebagai penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan sekedar untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara singkat dan koruptif.
- b. Kontribusi sistem politik yang belum optimal dalam Pemberantasan Tipikor, karena keterlibatan infrastruktur politik dalam sistem yang *high cost*.
- c. Tipikor adalah praktik kejahatan yang dilakukan dengan diam-diam dan rahasia, sehingga kebanyakan masyarakat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memerangi dan ikut serta dalam Pemberantasan Tipikor.
- d. Praktik Tipikor adalah bentuk paling nyata dari sifat serakah, karenanya tidak heran jika betapapun tingginya jabatan dan kayanya seorang pejabat negara, namun tetap saja melakukan Tipikor.

“*Grand Strategy*” politik hukum Pemberantasan Tipikor adalah bahwa Tipikor tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan praktik korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat memprihatinkan. Jadi, strategi Pemberantasan Tipikor mencakup dimensi yang luas.

Untuk itu, di samping beberapa hal yang sudah dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi sebagai Strategi Pemberantasan Tipikor, yaitu²⁵:

- a. Rekrutmen kepemimpinan di segala lini yang anti-KKN.

²⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 178.

²⁵ *Ibid.*, 184.

- b. Penguatan dan reformasi kelembagaan baik publik maupun privat terus-menerus.
- c. Penguatan hukum, praktik hukum dan acaranya.
- d. Pembentukan lingkungan luas yang berbudaya anti-korupsi, baik sektor publik maupun sektor privat.
- e. Pengembangan strategi yang proporsional antara langkah represif dan langkah preventif,
- f. Adanya keterpaduan sistem penegakan hukum dan kesamaan persepsi di antara aparaturnya penegak hukum terhadap pemberantasan Tipikor (*integrated legal system*).
- g. Harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan hukum internasional, antara lain dengan meratifikasi dan mengadopsi “*UN Convention Against Corruption 2003*” dan “*Palermo Convention on Transnational Organized Crime 2000*” ke dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tipikor yang sudah ada.
- h. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberantasan Tipikor.

Pemberantasan Tipikor tidak akan efektif tanpa ada ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber-sumber daya teknis lainnya. Pemberantasan Tipikor bisa diibaratkan berlagadi medan perang. Selain dukungan personil terlatih, juga dibutuhkan perangkat persenjataan plus amunisi yang memadai guna menghadapi musuh. Terkait dengan kondisi ini, sejatinya perangkat hukum (peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tipikor dan institusi pemberantas Tipikor) yang ada sudah relatif memadai dan bisa disebut lebih dari cukup untuk menjerat pelaku Tipikor²⁶.

Sekedar menyebut contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor (KPK), dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.

Bertambah besar volume pembangunan bertambah besar pula kemungkinan kebocoran. Ditambah dengan gaji pegawai negeri yang

²⁶ Ibid., 192

memang sangat minim di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pegawai negeri terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menambah penghasilannya²⁷.

Memang terjadi pula korupsi besar-besaran bagi mereka yang telah memperoleh pendapatan yang memadai disebabkan karena sifatnya yang serakah, tetapi ini bukan hal yang menyeluruh.

Menurut pendapat Gunner Myrdal bahwa jalan untuk memberantas korupsi di negara-negara berkembang ialah:

1. Menaikkan gaji pegawai rendah (dan menengah);
2. Menaikkan moral pegawai negeri;
3. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal.

Untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran, bagi pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi seperti bidang pelayanan masyarakat, pendapatan negara, penegak hukum, dan pembuat kebijakan harus di daftar kekayaannya sebelum menjabat jabatannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang resmi.

Pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata, seperti halnya dengan *Counter Corruption Act Thailand*, dapat diterapkan di Indonesia. Artinya pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang resmi dapat digugat langsung secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 BW ke Pengadilan Tinggi untuk dinyatakan dirampas untuk negara. Jadi, mirip dengan *Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang* tahun 1958 di Indonesia. Dengan demikian, harus ada sistem pendaftaran kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat sehingga dapat dihitung pertambahan kekayaannya itu²⁸. Hal ini sesuai pula dengan pasal 20 konvensi mengenai korupsi (*illicit enrichment*).

Penuntutan pidana hanya mempunyai fungsi sebagai obat yang terakhir. Jelas, korupsi tidak akan terberantas hanya dengan penjatuhan pidana yang berat saja, tanpa sesuatu prevensi yang lebih efektif.

²⁷ Andi hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, 259.

²⁸ Ibid., 260.

Dengan pidana mati pun, seperti di RRC ternyata tidak menghapus korupsi. Satu hal yang sering dilupakan ialah kurang diperhatikannya peningkatan kesadaran hukum rakyat. Selalu penegak hukum saja yang diancam dengan tindakan keras, tetapi jika rakyatnya sendiri menoleransi korupsi yang setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, dan setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut atau hakimnya untuk disogok, lingkaran setan korupsi tidak akan terberantas.

Di negara-negara Afrika Bagian Selatan dirumuskan strategi pemberantasan korupsi berbentuk piramida yang pada puncaknya adalah prevensi (pencerahan), sedangkan pada kedua sisinya masing-masing pendidikan masyarakat (public education) dan pemidanaan (punishment).

Dalam memberantas korupsi harus dicari penyebabnya lebih dahulu, kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif (pemidanaan).

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi yaitu ‘mencegah’, ‘memberantas’ dalam arti menindak pelaku korupsi, dan ‘peran serta masyarakat’.

Kemajuan teknologi informasi sudah banyak membantu KPK dalam melakukan tugas-tugasnya. Dari mulai gedung KPK yang dirancang sebagai *smart building*, *paper-less information system* yang diberlakukan sebagai mekanisme komunikasi internal di KPK, dan program-program kampanye serta pendidikan antikorupsi KPK. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, informasi elektronik sangat dibutuhkan agar informasi yang disampaikan dapat lebih cepat diterima, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. KPK juga telah mengadakan berbagai lomba bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang antara lain berupa lomba PSA antikorupsi, lomba film pendek antikorupsi, lomba poster, dan lomba-lomba lainnya.

Penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama diberi

kewenangan melakukan penyadapan. Dan tidak seperti yang dipersepsikan banyak orang, para penegak hukum tidak bisa sekehendak hatinya menggunakan instrumen yang sensitif ini.

Bagi KPK, penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada surat tugas yang ditandatangani Pimpinan KPK yang menganut kepemimpinan kolektif di antara lima komisionernya. Sedangkan keputusan untuk melakukan penyadapan didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data dan keterangan dilakukan setelah ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penyadapan bukan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan bukti adanya suatu tindak pidana korupsi, dan keputusan untuk melakukannya bukanlah keputusan yang mudah.²⁹

Dalam melakukan penyadapan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 serta pasal 12 butir a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK tunduk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Karena itu KPK tidak menganggap lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ancaman, karena penyadapan yang selama ini dilakukan merupakan *lawfull interception*, sesuai aturan yang ada dan dilakukan dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan kehati-hatian ekstra.

KPK tidak pernah menyebarluaskan hasil sadapan, kecuali sebagai pembuktian di sidang pengadilan, yang diperdengarkan atas perintah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpangsiuran informasi terjadi, ketika salah satu stasiun televisi swasta menayangkan program yang memuat upaya penindakan KPK lengkap dengan pemutaran rekaman hasil penyadapan yang dilakukan KPK.

Terkait dengan banyaknya tayangan dalam program tersebut yang menampilkan para terperiksa, terdakwa, dan terpidana kasus-kasus yang ditangani KPK, ada sebagian masyarakat yang menduga ada andil KPK di dalamnya. Sebagai catatan, gambar-gambar dan rekaman yang

²⁹ Wirdjono Projo Dikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 45.

ditampilkan tersebut diambil dari ruang persidangan atau di halaman dan lobby tamu KPK yang merupakan ruang publik. Parahnya lagi bukan hanya masyarakat awam hukum yang berpendapat demikian. Dalam satu kesempatan *talk show* di salah satu universitas di Yogyakarta medio September 2008 ini, seorang doktor hukum pun menyatakan bahwa KPK telah melanggar hak asasi manusia para terdakwa kasus tindak pidana korupsi karena memperdengarkan secara terus-menerus rekaman pembicaraan dengan tujuan sebagai hukuman asesoris yang diberikan untuk mempermalukan mereka.

Selama ini, KPK berusaha melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh undang-undang dengan semaksimal mungkin memanfaatkan kewenangan yang ada. Karena itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan kami cermati sebagai salah satu aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang KPK disebutkan bahwa: “Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa”.

Kalimat di atas bisa jadi merupakan salah satu alasan undang-undang ini mengatur kembali pemberian kewenangan penyadapan kepada KPK, sekalipun kewenangan yang sama telah diberikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang dimungkinkannya alat bukti petunjuk berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dari keinginan rakyat yang diterjemahkan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, seharusnya membawa implikasi pada penanganan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa pula – sekalipun tetap dalam koridor aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan kontroversi penyadapan dalam penindakan

korupsi kita dapat mengambil penyadapan atas kasus terorisme sebagai pembanding. POLRI telah lama melakukan penyadapan untuk kasus terorisme dan tidak pernah ada yang mempermasalahkannya. Besar kemungkinan karena kita sudah memahami bahaya terorisme. Hal ini menjadi tantangan bagi KPK untuk lebih giat menyampaikan betapa seriusnya implikasi dari korupsi ini. Betapa besar ongkos sosial korupsi yang harus dibayar seluruh rakyat Indonesia.³⁰

Ketika seorang Penyelenggara Negara menerima suap, uang suap itu masih bisa berperan dalam memutar roda perekonomian negara, sebagian bisa digunakan untuk membantu orang lain, atau bahkan disumbangkan ke lembaga keagamaan. Namun yang selama ini kurang kita sadari - kerusakan sudah terjadi, ketika seseorang dibiarkan melanggar aturan yang ditetapkan dengan tujuan-tujuan tertentu - karena dia telah menyuap, entah itu membabat hutan, memasukkan barang ilegal, menjual obat palsu, atau ribuan jenis lain pelanggaran yang pada akhirnya akan bermuara pada kesengsaraan rakyat Indonesia.

Mengingat itu semua, masih bisakah kita dengan percaya diri mengatakan bahwa bukan perilaku koruptif kitalah yang menyebabkan rakyat di bumi yang kaya raya ini harus berdiri berjam-jam sekedar untuk mendapatkan sembako atau uang sekedarnya? Alangkah tidak sepadan jika boleh kita membandingkan antara uang suap yang berpindah tangan itu dengan ongkos dan azab yang harus ditanggung (oleh orang lain, saudara kita sendiri).

Undang-Undang ITE mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Para penegak hukum termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil tentu saja berkepentingan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Karenanya keterlibatan mereka dalam penyusunan Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk menjamin profesionalisme, tanggung jawab, dan asas keadilan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil intersepsi.

Kinerja pemerintah dalam pemberantasan kasus korupsi masih belum maksimal. Dalam lima tahun terakhir, masih banyak ditemukan kebijakan yang justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Dengan kata lain, prestasi eksekutif di bawah kepemimpinan Susilo

³⁰ <http://makalahpipevi.blogspot.com/2012/06/pemberantasan-korupsi.html>, diakses 10-11-2014

Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) dalam memberantas korupsi masih jauh dari ekspektasi publik.

Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang justru menggembosi langkah pemberantasan korupsi itu sendiri. Lihat saja dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden SBY mengenai kewenangan KPK yang dianggapnya terlalu besar, upaya BPKP mengaudit KPK, serta rivalitas KPK vs Polri, terang Zainal Arifin Mochtar, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum (FH) UGM .

Selain adanya upaya melemahkan KPK oleh pemerintah, masih terdapat beberapa catatan atas kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi selama lima tahun terakhir. Pertama, kebijakan Presiden yang berdampak pada pemberantasan korupsi, antara lain, Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Keppres No. 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Timtas Tipikor, dan PP No. 37 Tahun 2006 tentang Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD.

Inpres No. 5 Tahun 2004 dan Keppres No. 11 Tahun 2005, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi. Namun dalam pelaksanaan, keduanya tidak berjalan efektif dan masih meninggalkan banyak catatan. Sementara itu, PP No. 37 Tahun 2006 justru merupakan blunder kebijakan yang ditempuh pemerintah. Dengan keluarnya PP tersebut, potensi terjadinya gejala korupsi, khususnya bagi anggota DPRD, menjadi semakin besar. Kedua, peran pemerintah dalam pembentukan undang-undang anti korupsi. Dalam penyusunan RUU Pengadilan Tipikor, pemerintah terbukti lamban. Selain itu, juga pada UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA. Komitmen pemerintah dalam hal ini patut dipertanyakan sebab isu paling krusial tentang perpanjangan usia hakim agung justru diusulkan oleh pemerintah.

Dalam penyelesaian adat atas dugaan kasus korupsi, setidaknya terdapat dua kasus yang disoroti, yakni kasus Amien Rais vs Presiden SBY dan Yusril Ihza Mahendra vs Taufiequrrahman Ruki. Dalam konteks ini, Presiden terlihat mengintervensi proses hukum yang semestinya dapat dijalankan sesuai dengan prosedur.

Di negara Indonesia, korupsi agaknya telah menjadi penyakit akut yang sulit untuk diberantas. Bertahun-tahun di bawah pemerintahan yang korup, menjadikan penyebaran korupsi semakin meluas dan sistemik. Korupsi yang meluas dengan gampang dapat kita jumpai pada

hampir seluruh kantor pelayanan publik. Korupsi menjadi bagian dari sistem pengelolaan negara. Celakanya, korupsi kerap melibatkan petinggi-petinggi negeri ini. Ketua DPR misalnya, adalah seorang terpidana yang entah mengapa tidak perlu mendekam di penjara seperti terpidana lainnya. Bisa jadi, Akbar Tanjung si terpidana itu bisa menyeret pejabat lainnya ke penjara kalau dirinya harus menginap di hotel prodeo.³¹

Dari sisi hukum, aparat penegak hukum juga tampak letoi ketika berhadapan dengan korupsi. Kalau menghadapi teroris macam Amrozi, Imam Samudera, dan lain sebagainya, dengan sigap polisi bertindak. Kejaksaan pun, dengan proses yang sangat cepat, mampu menyeret para terdakwa ke hadapan hakim di persidangan. Tetapi, sama seperti politisi, ketika menangani kasus korupsi ada banyak alasan sehingga berkas perkaraesti bolak-balik dikembalikan ke polisi, bukti tidak mendukung, atau keluar SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kalau tidak dituntut bebas.

Macetnya hukum dalam penanganan kasus korupsi bisa dimengerti dengan melihat korupsi sebagai fenomena sosiologis. Dalam kaca mata sosiologis, korupsi melibatkan jaringan elit kekuasaan, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena itu, bercokolnya Ketua DPR dari jerat hukum bisa dibaca sebagai upaya melindungi elit lain. Juga mengapa Jaksa Agung yang jelas-jelas dilaporkan ke polisi oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)

Salah satu produk hukum yang digulirkan untuk memberantas korupsi adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK. Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001. UU Anti Korupsi itu merupakan amandemen dari UU No.3 Tahun 1971 tentang Anti Korupsi yang dianggap sudah tidak memadai lagi.

Korupsi adalah extra ordinary crime, maka ada beberapa kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh KPK, diantaranya adalah:

Pertama, dipergunakannya alat bukti elektronik dalam pembuktian. Alat bukti elektronik meliputi e-mail, rekaman suara, rekaman video dan sebagainya. Bandingkan dengan KUHAP yang hanya mengakui kesaksian langsung dari seseorang.

³¹<http://makalahpipevi.blogspot.com/2012/06/pemberantasan-korupsi.html>, diakses 10-11-2014

Kedua, KPK memiliki kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Bahkan KPK bisa mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian. Sebagai kejahatan yang luar biasa, korupsi memang tidak bisa ditangani oleh aparatus negara konvensional seperti kejaksaan dan kepolisian. Apalagi dalam kurun waktu yang lama terbukti dua institusi penegak hukum itu gagal memberantas korupsi.

Ketiga, berbeda dengan kejahatan lain, persidangan kasus korupsi juga dilakukan dengan cara di luar kelaziman. Kelak kalau KPK telah berfungsi, koruptor akan diadili dalam Pengadilan Korupsi. Hakim yang mengadili, baik di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), banding (Pengadilan Tinggi) maupun kasasi (MA) terdiri dari lima orang, dua hakim reguler sedangkan tiga sisanya adalah hakim ad hoc.

Keempat, KPK tidak hanya bertugas pada ranah penegakan hukum. KPK juga melakukan tugas pencegahan, seperti memeriksa laporan kekayaan pejabat negara. Dengan berfungsinya KPK, maka KPKPN akan dibubarkan dan akan menjadi salah satu divisi dalam KPK. Dengan demikian, kasus laporan palsu kekayaan Jaksa Agung tidak akan terulang lagi karena berbeda dengan KPKPN, KPK bisa langsung menyidik dan menyeret Jaksa Agung ke Pengadilan Korupsi.

Karena begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh KPK, banyak pihak berharap KPK akan menjadi obat ampuh untuk menyembuhkan negeri ini dari korupsi. Apalagi anggota KPK hanya lima orang sehingga bisa mengurangi benturan kepentingan.

Berdasarkan pengalaman Komnas HAM dan KPKN, jumlah anggota yang besar menjadikan kedua komisi itu tidak bisa lincah dalam mengambil keputusan. Belum lagi komposisi anggota yang berwarna-warni latar belakangnya, menjadikan gerakan kedua komisi semakin lamban karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi. Akan tetapi, kekuasaan besar KPK juga tidak lepas dari ancaman dari para koruptor dan elit politik yang tidak berkepentingan. Sejak awal sebetulnya proses pembentukan komisi super ini kerap tersendat-sendat. Proses pembentukan KPK sendiri harus melalui berbagai tahapan yang cukup panjang. Pertama diawali dengan pembentukan tim seleksi. Anggota Tim Seleksi dipilih oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan ditetapkan oleh Presiden dengan Keppres. Selanjutnya Tim Seleksi yang

akan memiliki kandidat anggota KPK sebanyak 10 orang atau dua kali jabatan yang tersedia.

Simpulan

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau *dishonest* (ketidakjujuran). Korupsi di Indonesia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Rakyat kecil umumnya bersikap apatis dan acuh tak acuh. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Fenomena umum yang biasanya terjadi di Indonesia ialah selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat.

Peran serta pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditunjukkan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain : upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/mahasiswa dan upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Daftar Rujukan

- Bachtiar, Wardi. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 1997.
- Budiyanto. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Danil, Elwi. *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Djaja, Ermansjah -----, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Grafika, Redaksi Sinar. *Himpunan Peraturan Tentang Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- . *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- . *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1991
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- <http://auxeleri.blogspot.com/2013/10/makalah-pemberantasan-korupsi-di.html>, diakses 04-10-2014.
- <http://makalahpipevi.blogspot.com/2012/06/pemberantasan-korupsi.html>, diakses 10-11-2014.
- <http://seserahku.blogspot.com/2014/01/makalah-pemberantasan-korupsi-di.html>, diakses 3-11-2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah: Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: 2010.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris*. Bandung: Hasta, 1987.
- Saifullah. *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, t.t.
- Syamsudin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tim Perumus Lokakarya Pemberantasan KKN Forum Komunikasi dan Konsultasi Pakar-Setjen Wantannas Daerah Surabaya, *Kerangka Konseptual Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Surabaya, Makalah, 2000.
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak
Pidana Korupsi.
Wirdjono Projo Dikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2005.